

Development of Community Based Tourism in Pekasiran Village, Batur District, Banjarnegara Regency

Moch. Agus Syadad Saefullah^{1*}, Ridwan Iskandar², Budi Wibowo³, M. Romi Okta Viano⁴, Gilang Ramadhan⁵

Program Studi Manajemen Tata Hidang, Politeknik Pariwisata NHI
Bandung

ABSTRACT: In achieving the target of tourism contribution to GDP which reaches 12%, several tourism development strategies are needed. This research aims to determine how the development of community based tourism in Pekasiran Village. This research uses a qualitative approach with a case study method. In this research, it is more focused on village government, local communities, and POKDARWIS. The results research is that the village government carried out its role by facilitating the formation of Pokdarwis and taking policies in terms of the distribution of benefits and the results of managing tourism objects in the form of economic improvement. Pokdarwis carries out the role by encouraging and motivating the community to develop tourism objects. Local communities are also involved in planning and decision-making in the process of developing tourism objects, which in this case means that the tourism development process in Pekasiran Village has involved the active participation of the surrounding community.

Keyword: Tourism Development, Community Based Tourism, Tourism Development Concept

Corresponding Author: mochagusnyadad@gmail.com

Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat (*Community Based Tourism*) di Desa Pekasiran Kecamatan Batur Kabupaten Banjarnegara

Moch. Agus Syadad Saefullah^{1*}, Ridwan Iskandar², Budi Wibowo³, M. Romi Okta Viano⁴, Gilang Ramadhan⁵

Program Studi Manajemen Tata Hidang, Politeknik Pariwisata NHI Bandung

ABSTRAK: Dalam mencapai target kontribusi pariwisata terhadap PDB yang mencapai 12% diperlukan beberapa strategi pengembangan pariwisata. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengembangan pariwisata berbasis masyarakat di Desa Pekasiran. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Dalam penelitian ini difokuskan pada pengembangan pada pemerintahan desa, masyarakat lokal, dan POKDARWIS. Hasil penelitian menunjukkan pemerintah desa menjalankan perannya dengan memfasilitasi pembentukan Pokdarwis dan mengambil kebijakan dalam hal distribusi manfaat dan hasil pengelolaan objek wisata berupa peningkatan ekonomi. Pihak Pokdarwis melaksanakan peran pengembangan pariwisata berbasis masyarakat dengan mendorong masyarakat untuk mengembangkan objek wisata. Masyarakat lokal pun diikutsertakan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan dalam proses pengembangan objek wisata, yang dalam hal ini berarti proses pengembangan pariwisata sudah melibatkan partisipasi aktif masyarakat sekitar.

Kata Kunci: Pengembangan Pariwisata, Pariwisata Berbasis Masyarakat Konsep Pengembangan Pariwisata

Submitted: 8 July 2022.; Revised: 20 July; Accepted: 26 July

Corresponding Author: mochagusnyadad@gmail.com

PENDAHULUAN

Sektor pariwisata menjadi salah satu sektor yang dapat membantu pertumbuhan suatu perekonomian negara. Di beberapa negara proses perencanaan dan pengembangan kegiatan pariwisata menjadi skala prioritas bagi kerja pemerintahnya. Bukan hanya dari segi pendapatan negara saja, kegiatan pariwisata dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan membuka lebar lapangan pekerjaan masyarakat. Rahma (2013) menjelaskan bahwa perkembangan industri pariwisata tidak hanya berdampak pada devisa negara saja, namun juga telah mampu untuk memperluas kesempatan berusaha serta menciptakan suatu lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan dan mengatasi pengangguran di daerah.

Di Indonesia, sektor pariwisata pada tahun 2020 memberikan sumbangsih terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 4,1 persen. Sementara itu, pada tahun 2019 kontribusi sektor pariwisata sebesar 4,7 persen (katadata.co.id, 2021). Melansir pada laman publikasi katadata.co.id, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengatakan, tahun 2021 kontribusi sektor Parekraf kepada PDB sekitar 4,3 persen. Pemerintah menargetkan, kontribusi sektor Parekraf terhadap PDB bisa menembus 10-12 persen dalam waktu 5-10 tahun ke depan. Dalam mencapai target ini tentunya diperlukan beberapa strategi pengembangan pariwisata di Indonesia.

Yoeti (2002) menjelaskan pengembangan pariwisata adalah segala kegiatan dan usaha yang terkoordinasi untuk menarik wisatawan, menyediakan semua prasarana dan sarana, barang dan jasa fasilitas yang diperlukan, guna melayani wisatawan. Kegiatan dan pengembangan pariwisata mencakup segi-segi kehidupan dalam masyarakat, mulai dari kegiatan angkutan, akomodasi, atraksi wisata, makanan dan minuman, cinderamata, pelayanan dan lain-lain. Usaha ini mendorong dan meningkatkan arus kunjungan wisatawan mancanegara maupun wisatawan nusantara, sehingga memungkinkan perekonomian dalam negeri semakin maju dan berkembang.

Dalam proses perencanaan dan pengembangan pariwisata, sumber daya manusia (SDM) menjadi salah satu faktor penting yang perlu diperhatikan. Pengembangan SDM meminimalisir terhalangnya partisipasi masyarakat setempat dalam kegiatan ekonomi yang dikembangkan melalui kegiatan pariwisata di daerah. Kusworo dan Damanik (2002) mengatakan bahwa pembenahan sumber daya manusia dan birokrasi belum kuat disuarakan. Terdapat kesan yang cukup menonjol bahwa perhatian kita terutama masih bertumpu pada aspek kuantitatif, yakni seberapa besar devisa, kesempatan kerja, kunjungan wisatawan dan sebagainya, sementara aspek kualitatif yang antara lain dilihat dari perubahan positif mutu sumberdaya manusia cenderung diabaikan.

Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkaitan dengan pariwisata adalah seluruh aspek manusia yang mendukung kegiatan wisata baik yang bersifat *tangible* maupun *intangibile* yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan mewujudkan terciptanya kepuasan wisatawan serta berdampak positif terhadap ekonomi, kesejahteraan dan kelestarian lingkungan dan budaya di suatu kawasan wisata (Setiawan, 2016). Kegiatan pariwisata sangat tergantung kepada

interaksi antara manusia. Sehingga aspek manusia menjadi penting sebagai penggerak bagi kelangsungan industri pariwisata di suatu negara.

Salah satu konsep pengelolaan dalam upaya memberikan nilai tambah ganda adalah melalui konsep pengembangan Pariwisata berbasis komunitas atau masyarakat terutama di pedesaan (Trunajaya,2016). *Community Based Tourism* (CBT) merupakan salah satu bentuk pariwisata yang dibangun melalui negosiasi dan keterlibatan pemangku kepentingan utama dalam destinasi. Beberapa ahli mendefinisikan CBT sebagai pariwisata yang dimiliki dan dioperasikan oleh masyarakat. CBT adalah bentuk pariwisata di mana penduduk setempat memiliki pengaruh yang signifikan dan aktif dalam pertumbuhan dan pengelolaannya, dan sebagian besar keuntungannya disimpan oleh kota. Ini adalah bentuk pariwisata pedesaan yang semakin diterima di sebagian besar negara berkembang sebagai strategi pengentasan kemiskinan (Saarinen, 2006).

Setyaningsih (2010) konsep *community based tourism* akan melibatkan masyarakat dalam proses pembuatan keputusan khususnya terkait dengan perolehan pendapatan, kesempatan kerja serta pelestarian lingkungan dan budaya asli setempat yang pada akhirnya menumbuhkan jati diri dan rasa bangga dari penduduk setempat yang timbul akibat peningkatan kegiatan pariwisata. CBT merupakan sebuah pembangunan berkelanjutan dengan melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama melalui pemberdayaan masyarakat dalam berbagai kegiatan kepariwisataan.

Provinsi Jawa Tengah memiliki tempat wisata yang beragam. Diantara tempat wisata yang ramai dikunjungi wisatawan adalah objek wisata di kawasan dataran tinggi Dieng yang tepat terletak di kabupaten Wonosobo dan Banjarnegara Jawa Tengah. Di dataran tinggi Dieng terdapat beberapa desa wisata yang menjadi daya tarik wisatawan, salah satunya adalah desa wisata Pekasiran yang tepat berada di kecamatan Batur kabupaten Banjarnegara dan masih termasuk ke dalam objek wisata zona II Dieng Plateau.

Di desa Pekasiran terdapat beberapa atraksi wisata alam yang masih memerlukan pengembangan diantaranya adalah pengembangan dari aspek SDM, diantaranya Sumur Jalatunda, Kawah Candradimuka, Telaga Dringo, Telaga Sinila, Goa Jimat, Goa Batu Giong dan Bukit Cimetri Padang Savana. Beberapa atraksi wisata alam tersebut memiliki keunikan dan keotentikannya seperti lokasi wisata masih terpelihara dan terjaga dan memiliki nilai filosofis, sejarah dan warisan setempat.

Dari hasil kegiatan pra survey P2M Poltekpar NHI Bandung tahun 2022, saat ini objek wisata yang masuk ke dalam zona II Dieng Plateau ini masih belum dikembangkan secara maksimal, hal ini dapat dilihat dari kualitas informasi, brosur, fasilitas interpretasi yang masih minim, ditambah dengan papan petunjuk menuju objek wisata yang masih kurang, dari segi kelembagaan seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), Kelompok Sadar Wisata (pokdarwis) masih memiliki kinerja yang kurang maksimal. Partisipasi masyarakat setempat dalam pengelolaan objek wisata masih dikatakan rendah hal ini terlihat dari sumber pendapatan masyarakat setempat masih tetap seperti semula seperti bertani dan berkebun.

Dengan pariwisata berbasis masyarakat, masyarakat memperoleh tambahan pendapatan dari kegiatan pariwisata di daerahnya. Salah satu tujuan dari pariwisata berbasis masyarakat adalah pembagian keuntungan dari usaha pariwisata lebih banyak diterima langsung oleh masyarakat. Masyarakat dapat terlibat aktif dalam aspek-aspek kegiatan pariwisata tersebut seperti misalnya, masyarakat mengatur langsung penyediaan jasa kepada wisatawan seperti penginapan, makanan, pemandu wisata sehingga masyarakat memperoleh pendapatan tambahan.

Berdasarkan uraian tersebut maka dapatlah dikatakan bahwa terdapat peran penting masyarakat di objek wisata desa Pekasiran yang dapat menjadi motor penggerak kelangsungan kegiatan pariwisata dan memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengembangan pengembangan pariwisata berbasis masyarakat (*Community Based Tourism*) di Desa Pekasiran Kecamatan Batur Kabupaten Banjarnegara Jawa Tengah.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Pengelolaan Pariwisata

Balderton dalam Adisasmita (2011) istilah pengelolaan sama dengan manajemen yaitu menggerakkan, mengorganisasikan serta mengarahkan kepada usaha manusia untuk dapat memanfaatkan secara efektif material serta fasilitas dalam mencapai suatu tujuan. Dalam manajemen terdiri dari kegiatan-kegiatan seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan yang dapat dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan dalam sumber daya manusia serta sumber-sumber lainnya (Terry,2009).

Menurut Cox dalam Pitana (2009) pengelolaan pariwisata harus memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Pembangunan dan pengembangan pariwisata haruslah didasarkan pada kearifan lokal dan *special local sense* yang merefleksikan keunikan peninggalan budaya dan keunikan lingkungan
2. Preservasi, proteksi, dan peningkatan kualitas sumber daya yang menjadi basis pengembangan kawasan pariwisata
3. Pengembangan atraksi wisata tambahan yang mengakar pada khasanah budaya lokal
4. Pelayanan kepada wisatawan yang berbasis kepada keunikan budaya dan lingkungan lokal.
5. Memberikan dukungan dan legitimasi pada pembangunan dan pengembangan pariwisata jika terbukti memberikan manfaat positif, tetapi sebaliknya mengendalikan dan/atau menghentikan aktivitas pariwisata tersebut jika melampaui ambang batas lingkungan alam atau akseptabilitas sosial walaupun di sisi lain mampu meningkatkan pendapatan masyarakat.

Berdasarkan pengertian pengelolaan tersebut dapat disimpulkan bahwa pengelolaan pariwisata mencakup rangkaian proses yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian terhadap aspek-aspek yang membangun sebuah kegiatan pariwisata. Menurut Undang-undang No 9 tahun 1990 disebutkan bahwa usaha pariwisata adalah usaha dibidang pariwisata yang

menghasilkan produk tertentu. Produk wisata sebenarnya bukan hanya suatu produk yang nyata (*tangible*) akan tetapi juga merupakan suatu rangkaian produk (barang dan jasa) yang tidak hanya dapat mempunyai segi-segi yang dapat bersifat ekonomis, namun juga dapat bersifat sosial, psikologis serta alam.

Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan (*Empowerment*) secara konsep berarti pemberdayaan atau pemberkuasaan. Suharto (2017) Kekuasaan seringkali dikaitkan dengan kemampuan kita untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka. Dalam konteks pemberdayaan masyarakat, Payne dalam Adi (2008) mengemukakan bahwa pemberdayaan (*empowerment*) pada intinya ditujukan guna membantu klien memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan ia lakukan yang terkait dengan diri mereka, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan. Hal ini dilakukan melalui dan fase percaya diri untuk menggunakan daya yang ia miliki, antara lain melalui transfer daya dari lingkungannya.

Craig dan Mayo dalam Alfitri (2011) konsep pemberdayaan masyarakat terdiri unsur kemandirian, partisipasi, jaringan kerja, dan pemerataan. Konsep ini memiliki cakupan luas tidak hanya semata-mata memenuhi kebutuhan dasar untuk mencegah proses pemiskinan lebih lanjut namun juga mencakup pengembangan secara keseluruhan, mulai dari aspek manusia, aspek sosial dan aspek ekonomi.

Dwidjowijoto (2017) menjelaskan bahwa konsep pemberdayaan masyarakat mencakup pengertian *community development* (pembangunan masyarakat) dan *community based development* (pembangunan yang bertumpu pada masyarakat) dan tahap selanjutnya muncul istilah *community driven development* yang diterjemahkan sebagai pembangunan yang diarahkan masyarakat atau diistilahkan sebagai pembangunan yang digerakan oleh masyarakat. Konsep *empowerment* sebagai konsep alternatif pembangunan yang pada intinya menekankan pada otonomi pengambilan keputusan dari suatu kelompok masyarakat yang berlandaskan pada sumber daya pribadi, langsung melalui partisipasi, demokrasi dan pembelajaran sosial melalui pengalaman langsung.

Tujuan dari pemberdayaan masyarakat ini adalah mencapai tujuan hidup dari masyarakat itu sendiri selain itu peningkatan kesejahteraan dan mutu hidup masyarakat. Mardikanto (2010) menjelaskan bahwa pemberdayaan pada hakekatnya adalah untuk menyiapkan masyarakat agar mereka mampu dan mau secara aktif berpartisipasi dalam setiap program dan kegiatan pembangunan yang bertujuan untuk memperbaiki mutu hidup (kesejahteraan) masyarakat baik dalam pengertian ekonomi, sosial, fisik maupun mental.

Menurut Hutomo (2000) secara umum, kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat dapat dikelompokkan dalam beberapa kegiatan yaitu:

a. Bantuan modal

Aspek permodalan sangat penting dalam melakukan pemberdayaan masyarakat karena apabila tidak ada modal maka masyarakat tidak akan mampu berbuat untuk dirinya sendiri maupun untuk lingkungannya.

b. Bantuan pembangunan prasarana

Tersedianya prasarana di tengah-tengah masyarakat yang kurang berdaya akan mendorong dan meningkatkan mereka untuk menggali potensi-potensi yang dimilikinya. Selain itu, dengan adanya prasarana akan memudahkan mereka untuk melakukan aktivitasnya.

c. Bantuan pendampingan

Pendampingan masyarakat memang perlu dan penting. Tugas utama seorang pendamping adalah memfasilitasi proses belajar atau refleksi dan menjadi indikator untuk masyarakat.

d. Penguatan kelembagaan

Adanya sebuah Lembaga atau organisasi di tengah-tengah masyarakat merupakan salah satu aspek penting. Fungsi dari keberadaan Lembaga tersebut adalah untuk memfasilitasi masyarakat dan memberikan kemudahan dalam melakukan akses-akses yang diinginkan, seperti permodalan, media musyawarah dan lain sebagainya.

e. Penguatan kemitraan

Pemberdayaan masyarakat adalah penguatan bersama, dimana yang besar hanya akan berkembang kalau ada yang kecil dan menengah dan yang kecil akan berkembang kalau ada yang menengah dan besar. Daya saing yang tinggi hanya ada jika keterkaitan antara yang besar dengan yang menengah dan kecil. Sebab, hanya dengan keterkaitan yang adil maka efisiensi akan terbangun. Oleh sebab itu, melakukan kemitraan masing-masing pihak perlu diberdayakan.

Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat (Community Based Tourism)

Tefler dan Sharpley (2008) menjelaskan bahwa pariwisata berbasis masyarakat merupakan salah satu jenis pariwisata yang memasukkan partisipasi masyarakat sebagai unsur utama dalam pariwisata guna mencapai tujuan pembangunan pariwisata berkelanjutan. Timothy dan Boyd (2003) menyebutkan bahwa pariwisata berbasis masyarakat sebagai partisipasi masyarakat dalam pembangunan pariwisata. Dalam hal ini, partisipasi masyarakat dapat dilakukan dengan dua cara yaitu ikut terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan pembagian manfaat pariwisata.

Dari ke dua pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pengembangan pariwisata berbasis masyarakat merupakan kegiatan pengembangan berkelanjutan yang memanfaatkan partisipasi masyarakat untuk mencapai tujuan pembangunan pariwisata. Pariwisata berbasis masyarakat ini dilakukan dalam konteks Kerjasama masyarakat secara keseluruhan berupa partisipasi masyarakat dan pembagian manfaat dari kegiatan pariwisata tersebut.

Janianton (2013) dalam teori *community based tourism* melihat bukan dari aspek ekonomi terlebih dahulu melainkan aspek pengembangan kapasitas komunitas dan lingkungan, sementara aspek ekonomi menjadi *induced impact* dari aspek sosial, budaya dan lingkungan. Dalam pengembangan pariwisata berbasis masyarakat, partisipasi masyarakat lebih dititikberatkan. Terdapat beberapa aspek partisipasi masyarakat yang dapat diukur, Sastrayuda (2010) menjelaskan tinggi rendahnya partisipasi yang diberikan akan berdasarkan pada tingkat keberdayaan yang dimiliki oleh masyarakat dan kemampuan pemahaman pada setiap level dalam proses kebijakan publik. Pada dasarnya

tidak semua masyarakat sudah mampu memberikan saran, kritik, ide dan sebagainya. Peran lain dapat juga digali yaitu partisipasi dibidang pendanaan. Pengerahan dana masyarakat sering kali dilakukan sebagai perbandingan kemampuan masyarakat terhadap pendanaan dalam satu kegiatan pembangunan yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah maupun pihak swasta, sumber pendanaan yang dihimpun masyarakat lebih populer disebut dengan swadaya masyarakat. Peran masyarakat yang lain adalah memilih fungsi pada kontrol sosial dalam rangka pelestarian dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan.

Partisipasi masyarakat ini menegaskan bahwa masyarakat lokal memiliki peranan dalam pembangunan pariwisata, melalui pemberdayaan masyarakat lokal diharapkan masyarakat dapat turut andil dalam perencanaan, pengelolaan dan pemberian pengambilan keputusan dalam pembangunan pariwisata setempat. Hal itu dilakukan agar tujuan dan sasaran kegiatan pariwisata dapat tercapai.

Rohim (2013) Keterlibatan masyarakat dalam pengembangan pariwisata berwujud partisipasi dapat dilihat dalam 5 tahap sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan. Partisipasi masyarakat pada tahap ini adalah dengan mengikuti sosialisasi yang diadakan untuk menyongsong kehadiran pengembangan objek wisata.
2. Tahap Perencanaan. Tahap ini terdiri dari identifikasi kebutuhan dan analisis kemampuan. Pada tahap ini partisipasi masyarakat bersifat fungsional, artinya masyarakat setempat berpartisipasi terhadap apa yang sudah ditetapkan oleh tenaga ahli yang diberi kepercayaan dalam pengembangan objek wisata.
3. Tahap Operasional. Tahap ini terdiri atas partisipasi berbentuk fisik (*physical participation*) seperti mobilitas sendiri artinya masyarakat dengan penuh kesadaran membangun fasilitas fisik untuk menunjang pengembangan pariwisata di desanya.
4. Tahap Pengembangan. Pada tahap ini partisipasi bersifat spontan antara lain dengan mendirikan dan mengelola usaha-usaha yang terkait dengan kepariwisataan seperti pengelolaan usaha penginapan, usaha warung makan dan minum serta usaha yang menjual kebutuhan sehari-hari.
5. Tahap Pengawasan. Pada tahap ini, partisipasi masyarakat lebih kepada pengawasan yang bersifat praktis dan preventif.

Selain partisipasi masyarakat dalam *community based tourism* aspek selanjutnya yaitu mengambil peran dalam pembagian manfaat pariwisata. Timothy (1999) Hal ini mengandung pengertian bahwa masyarakat semestinya mempunyai kesempatan untuk memperoleh keuntungan finansial dari pariwisata dan keterkaitan dengan sektor lainnya. Untuk itu pengembangan destinasi pariwisata seharusnya mampu menciptakan peluang pekerjaan, kesempatan berusaha dan mendapatkan pelatihan serta pendidikan bagi masyarakat agar mengetahui manfaat pariwisata.

Menurut Murphy (1985) pariwisata merupakan sebuah "*community industry*", sehingga keberlanjutan pembangunan pariwisata sangat tergantung dan ditentukan oleh penerimaan dan dukungan masyarakat terhadap pariwisata. Implikasi pariwisata sebagai sebuah industri masyarakat adalah

adanya kepastian bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengembangan pariwisata.

METODOLOGI

Pendekatan pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Arikunto (2002), penelitian kualitatif bertujuan untuk menghasilkan gambaran yang akurat tentang sebuah fenomena sosial dan menggambarkan mekanisme sebuah proses atau hubungan serta menyajikan informasi dasar terkait topik penelitian dalam bentuk gambaran verbal maupun numerical. Menurut Sugiyono (2012) dalam penelitian kualitatif landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Dalam penelitian ini peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mengamati fakta-fakta dilapangan dari beberapa narasumber.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan studi kasus (*case studies*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga atau gejala sosial tertentu. Dalam penelitian ini lebih difokuskan pada pengembangan sumber daya manusia pada pemerintahan desa, masyarakat lokal, dan Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS).

Sumber data pada penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer didapat dari hasil wawancara dan observasi, sedangkan data sekunder yang merupakan data pendukung didapat dari dokumentasi dan studi pustaka. Wawancara yang digunakan menggunakan teknik wawancara bebas terstruktur yaitu wawancara langsung dengan perangkat desa, masyarakat dan anggota POKDARWIS.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini melewati beberapa tahapan diantaranya:

a. Tahap Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan tahap pertama dan utama. Tujuan dari penelitian didapat dengan pengumpulan data yang sesuai dengan kebutuhan dan standar yang telah ditetapkan.

b. Tahap Reduksi Data

Reduksi data merupakan kegiatan mempertegas, memperpendek, membuat hal yang penting dan mengatur data sehingga kesimpulan data bisa didapat.

c. Tahap Sajian Data

Sajian data merupakan kegiatan penyajian informasi berupa kesimpulan secara singkat, sistematis, logis dan dapat dipahami.

d. Tahap Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan bentuk pertanggungjawaban peneliti dari data awal yang dikumpulkan, direduksi dan disajikan.

Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2012), penelitian kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu *data reduction, data display, concluding drawing/verification*.

HASIL PENELITIAN

Desa Pekasiran berada di wilayah Kecamatan Batur Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah dengan luas wilayah 915 Ha dan ketinggian 1.843 Mdpl. Secara administratif Desa Pekasiran terbagi menjadi 3 dusun yaitu Dusun Santren, Dusun Argomukti dan Dusun Sidomulyo. Desa Pekasiran yang memiliki jumlah penduduk 6.045 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 3.084 orang atau sekitar 51% dan 2.961 orang berjenis kelamin perempuan atau sekitar 49% mayoritas merupakan bermata pencaharian sebagai petani dengan jumlah 2.137 penduduk, yang lainnya bermata pencaharian seperti buruh, pedagang dan swasta.

Desa Pekasiran memiliki potensi sumber daya alam berupa tegalan sekitar 67% dari luas wilayah, hutan sekitar 30%, pemukiman sekitar 3% dan pekarangan sekitar 0,2%. Selain potensi sumber daya alam, desa Pekasiran yang termasuk ke dalam objek wisata zona II Dieng Plateau memiliki potensi wisata diantaranya, Danau/Telaga Dringo, Danau/Telaga Sinila, Kawah Candradimuka, Sumur Jalatunda, Tugu Legetang dan Coban Ireng, dari ke enam potensi wisata tersebut Danau/Telaga Dringo dan Kawah Candradimuka yang merupakan objek wisata populer. Kedua objek wisata tersebut masuk ke dalam objek wisata yang dijadikan paket wisata Dieng.

Pengembangan pariwisata berbasis masyarakat pada dasarnya adalah menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dalam pengembangan pariwisata dalam bentuk keterlibatan dan partisipasi yang diberikan oleh masyarakat itu sendiri. Dalam penelitian ini terdapat 3 pihak yang peneliti observasi untuk mengetahui sejauh mana pengembangan pariwisata berbasis masyarakat di Desa Pekasiran diantaranya adalah perangkat desa, POKDARWIS dan masyarakat lokal.

PEMBAHASAN

Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat

1. Peran Perangkat Desa dalam Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat

Pemerintah desa memiliki peran sentral dalam pengembangan pariwisata di daerahnya. Pemerintah desa memiliki peran dalam pengembangan pariwisata diantaranya:

- a. Memfasilitasi pembentukan kelompok masyarakat untuk berperan aktif dalam pengembangan pariwisata

Pemerintah desa berperan untuk mengatur sumber daya manusia yang ada untuk menjadi pengelola wisata diantaranya adalah memfasilitasi pembentukan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis).

“Kami sudah membentuk Pokdarwis, dengan harapan kelompok ini dapat dengan maksimal fokus dalam pengembangan objek wisata disini, kami membentuk Pokdarwis sebagai upaya kami untuk memfasilitasi masyarakat untuk bisa ikut berperan aktif dalam pengelolaan objek wisata. Saat ini untuk pelaksanaan teknis seperti penjaga tiket, penjaga kebersihan objek wisata disini dikelola oleh Pokdarwis”. (Wawancara dengan kepala Desa Pekasiran, tanggal 25 Mei 2022)

- b. Distribusi manfaat dan hasil pengelolaan objek wisata

Pemerintah desa memiliki kebijakan dalam pengaturan distribusi hasil pengelolaan objek wisata di daerahnya. Pendistribusian hasil pengelolaan objek wisata diharapkan dapat memberikan manfaat terutama dalam hal ekonomi kepada masyarakat dan berbagai pihak yang berhak.

“Hasil pengelolaan objek wisata yang ada di Desa Pekasiran ini dibagi kepada 3 pihak diantaranya 70% dikelola oleh Pokdarwis, 15% oleh Perhutani dan 15% oleh desa”. (Wawancara dengan Kepala Desa Pekasiran, tanggal 25 Mei 2022)

- c. Memfasilitasi kegiatan kerjasama dengan berbagai pihak swasta atau investor

Pemerintah desa menjadi penggerak dalam memfasilitasi berbagai kegiatan kerjasama baik dengan pihak swasta maupun dengan pihak pemerintah. Hal ini terkait dengan kegiatan investasi dan pengembangan pengetahuan terkait pengelolaan pariwisata.

“Selama ini saya selaku kepala Desa Pekasiran sudah melakukan upaya kerjasama dengan beberapa pihak swasta maupun pemerintah kabupaten dan provinsi meskipun belum ada hasil yang maksimal sesuai harapan, akan tetapi usaha ini akan terus kami lakukan dengan harapan ada pihak investor swasta yang tertarik untuk membuka usaha di sekitar objek wisata”. (Wawancara dengan Kepala Desa Pekasiran, tanggal 25 Mei 2022)

Hasil Analisis

Berdasarkan hasil wawancara di atas dengan kepala desa Pekasiran, didapatkan informasi bahwa perangkat desa sudah berperan aktif dalam pengembangan pariwisata berbasis masyarakat berupa memfasilitasi pembentukan Pokdarwis, pendistribusian manfaat dan hasil pengelolaan objek wisata dan memfasilitasi kegiatan Kerjasama dengan berbagai pihak swasta atau investor, hanya saja belum menunjukkan hasil yang maksimal dalam upaya perangkat desa mengikutsertakan masyarakat dalam pengelolaan objek wisata di desa Pekasiran. Mayoritas masyarakat masih memilih untuk mendapatkan penghasilan untuk kehidupannya dari bidang pertanian dan perkebunan. Masyarakat yang tergabung dalam Pokdarwis belum maksimal. Hanya beberapa masyarakat yang ikut terlibat aktif dalam pelayanan objek wisata.

Konsep pengembangan pariwisata berbasis masyarakat menekankan keikutsertaan masyarakat lokal dalam upaya mengembangkan objek wisata disuatu daerah. Melalui keikutsertaan masyarakat lokal, kegiatan pariwisata dapat secara langsung memberikan manfaat bagi masyarakat terutama dalam aspek pendapatan masyarakat.

Integrasi masyarakat local dalam perencanaan dan pengembangan destinasi pariwisata dimaksudkan untuk memastikan masyarakat local mendapat ruang dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan pariwisata. Kerangka pemikiran integrasi dimulai dari pemahaman mendasar tentang destinasi pariwisata. Di dalam destinasi pariwisata, tidak hanya terdapat industry pariwisata (produk, pasar dan

akses), melainkan juga ada keterkaitan industry lain termasuk masyarakat local. Sehingga dapat dikatakan masyarakat local posisinya sangat strategis dan setara dengan pengambil keputusan lainnya (*stakeholders*) dalam pengembangan destinasi pariwisata (Adikampana, 2017).

2. Peran Pokdarwis dalam Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat

- a. Mendorong dan memotivasi masyarakat untuk mengembangkan objek wisata

Peran Pokdarwis dalam pengembangan pariwisata berbasis masyarakat salah satunya adalah mengembangkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pariwisata. Pokdarwis Desa Pekasiran mengajak serta masyarakat untuk terlibat dalam pengelolaan objek wisata seperti sebagai penjaga tiket, petugas kebersihan dan keamanan dan mendorong masyarakat sekitar untuk membuka usaha di sekitar objek wisata seperti membuka warung.

“Masyarakat disini juga terlibat langsung dalam pengelolaan objek wisata, seperti penjaga tiket, petugas kebersihan dan keamanan objek wisata hanya saja masyarakat disini masih kurang tertarik untuk ikut terlibat langsung dalam pengelolaan karena penghasilan yang kurang mencukupi kebutuhan mereka, akhirnya masyarakat banyak memilih untuk menjadi petani saja”. (Wawancara dengan Ketua Pokdarwis, tanggal 26 Mei 2022)

- b. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan para anggota dalam mengelola bidang usaha pariwisata

Peran Pokdarwis lainnya dalam pengembangan pariwisata berbasis masyarakat adalah membantu meningkatkan pengetahuan dan kemampuan para anggotanya dan masyarakat dalam mengelola bidang usaha pariwisata. Dalam upaya ini Pokdarwis menerima bentuk kerjasama dengan beberapa pihak terutama pihak akademisi untuk memberikan pengetahuan terkait dengan pengelolaan pada bidang pariwisata.

“Anggota kami dan masyarakat pernah diikutsertakan dalam pelatihan maupun sosialisasi terkait dengan bagaimana pengelolaan objek wisata di desa kami ini, hal ini kami sambut antusias karena kami perlu peningkatan pengetahuan terkait hal tersebut. Jika dilihat jarang sekali dari anggota kami, terlebih masyarakat yang memiliki Pendidikan mumpuni terkait pengelolaan pariwisata”. (Wawancara dengan Ketua Pokdarwis, tanggal 26 Mei 2022)

Hasil Analisis

Lingkup kegiatan dan peran Pokdarwis menurut Firmansyah (2012:27) dalam buku panduan Kelompok Sadar Wisata adalah berbagai kegiatan yang dapat diprogramkan dan dilaksanakan untuk mewujudkan fungsi dan tujuan pembentukan organisasi Pokdarwis. Lingkup kegiatan tersebut meliputi: Mendorong dan memotivasi masyarakat untuk mengembangkan objek wisata dan meningkatkan pengetahuan dan kemampuan para anggota dalam mengelola bidang usaha pariwisata

Mendorong dan memotivasi masyarakat terutama agar menjadi tuan rumah yang baik dalam mendukung kegiatan pariwisata merupakan peran penting Pokdarwis. Menurut Yoeti (2008:120) pengembangan objek wisata pada dasarnya mencakup enam hal, yaitu salah satunya adalah pembinaan masyarakat wisata. Adapun tujuan pembinaan masyarakat adalah: a) menggalakan pemeliharaan segi-segi positif dari masyarakat yang langsung maupun tidak langsung yang bermanfaat bagi pengembangan pariwisata, b) mengurangi pengaruh buruk akibat dari pengembangan pariwisata, c) pembinaan kerjasama baik berupa pembinaan produk wisatam pemasaran dan pembinaan masyarakat

Peran Pokdarwis sebagai Lembaga penggerak pariwisata mempunyai tanggungjawab untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan paran anggotanya dan juga masyarakat dalam bidang kepariwisataan. Peningkatan pengetahuan yang didapat oleh anggota Pokdarwis dan masyarakat Desa Pekasiran berupa sosialisasi dan pelatihan-pelatihan oleh beberapa pihak terutama pihak akademisi.

Menurut Suwanto (2004:19) dalam pengembangan pariwisata terdapat unsur-unsur pariwisata yang harus dikembangkan dan menjadi penunjang pengembangan pariwisata di daerah tujuan wisata yaitu masyarakat dan lingkungan, terbinanya masyarakat yang sadar wisata yaitu masyarakat dan lingkungan, terbinanya masyarakat yang sadar wisata akan berdampak positif karena mereka akan memperoleh keuntungan dari para wisatawan yang berkunjung.

3. Peran Masyarakat Lokal dalam Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat

a. Terlibat aktif dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan

Dalam pengembangan pariwisata berbasis masyarakat, masyarakat ikut berpartisipasi dan terlibat aktif diantaranya dalam proses perencanaan pengelolaan objek wisata dan dilibatkan dalam pengambilan keputusannya.

“Saya sebagai masyarakat di Desa Pekasiran pernah diundang oleh pihak kantor desa untuk mengikuti rapat. Rapat tersebut membahas bagaimana pengembangan tempat wisata di sini, dan masyarakat diberikan kesempatan untuk bisa membuka usaha di dekat objek wisata seperti membuka warung makanan”. (Wawancara dengan masyarakat lokal, tanggal 26 Mei 2022)

b. Ikut serta melestarikan objek wisata

Bentuk lain dari peran masyarakat dalam pengembangan pariwisata adalah ikut serta dalam melestarikan objek wisata, dengan begitu objek wisata yang ada di desa mereka dapat terus terjaga dan menjadi daya tarik wisatawan, sehingga wisatawan akan secara berkelanjutan mengunjungi objek wisata yang ada di desa mereka.

“ Sampai saat ini masyarakat menyadari bahwa objek wisata di desa Pekasiran ini memiliki daya tarik tersendiri, sehingga saya rasa masyarakat di desa ini sudah berupaya melestarikan objek-objek wusata di desa ini dengan cara menjaga kebersihan

dan keamanan dari objek wisata". (Wawancara dengan masyarakat local, tanggal 26 Mei 2022)

Hasil Analisis

Palimbunga (2017:25) menjelaskan bahwa bentuk-bentuk partisipasi masyarakat terdiri dari perencanaan (*planning*), pelaksanaan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*). Pada tahap perencanaan masyarakat diberi kesempatan untuk memberikan pendapat dan saran untuk perencanaan program-program pengembangan pariwisata namun keputusan tetap dikeluarkan oleh pihak pemerintah.

Partisipasi masyarakat dalam tahap pelaksanaan (*actuating*) berupa keterlibatan masyarakat dalam dalam berbagai kegiatan yang telah disepakati oleh masyarakat dan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Sebagai contoh adalah pelaksanaan program sosialisasi sadar wisata bagi masyarakat, program pelatihan pemandu wisata terpadu. Tahap akhir yaitu tahap pengawasan (*controlling*) terhadap program pengembangan pariwisata.

Faktor Pendukung dan Penghambat Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat di Desa Pekasiran

Hasil dari observasi dan wawancara peneliti kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengembangan pariwisata berbasis masyarakat di Desa Pekasiran di dapat faktor pendukung dan penghambat dalam pengembangan objek wisata yang ada di Desa Pekasiran, diantaranya adalah:

1. Faktor Pendukung

Awal dibukanya objek wisata di Desa Pekasiran salah satunya karena adanya pendukung baik dari segi sumber daya alam yang sudah terbentuk maupun proses tata kelola wisata yang dirancang dengan baik sesuai dengan keinginan dan target yang ingin dicapai. Beberapa faktor pendukung dibawah ini menjadi hal yang menguntungkan bagi pihak pengelola dalam upaya pengembangan wisata di Desa Pekasiran diantaranya adalah sumber daya alam berupa bidang pertanian yang menghasilkan komoditas tanaman hortikultura maupun komoditas tanaman endemik, kondisi alam yang masih terjaga, sudah terbentuknya Lembaga-lembaga di bidang ekonomi, sosial budaya dan organisasi kepemudaan.

a. Sumber Daya Alam dan Kondisi Alam yang Masih Terjaga

Negara Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang beraneka ragam, mulai dari laut, hutan, gunung dan yang lainnya. Tidak terkecuali di Desa Pekasiran ini, dengan letak geografis yang berada di dataran tinggi pemilihan lokasi wisata di daerah ini sangat tepat, ditambah dengan adanya atraksi wisata tidak bergerak hasil dari proses alam seperti kawah dan danau. Dengan kondisi alam yang seperti itu menjadi objek wisata favorit bagi wisatawan baik yang berasal dari dalam maupun luar daerah.

"Objek wisata di sini memanfaatkan salah satu telaga yang masih cukup alami, pemandangan yang ditawarkan kepada wisatawan yang datang juga berupa area hutan lebat yang masih asri dan terjaga. Telaga Dringo ini memang tidak bisa digunakan untuk berenang akan tetapi bisa digunakan untuk berkemah,

sehingga kami harapkan bisa dikembangkan semacam bumi perkemahan di area danau". (Wawancara dengan Ketua Pokdarwis tanggal 26 Mei 2022).

Bagi wisatawan yang mengunjungi objek wisata tentunya mencari sebuah daya tarik dari tempat wisata itu sendiri. Objek wisata yang alami dan masih terjaga kenaturalannya mampu menjadi daya Tarik dari sebuah objek wisata. Daya Tarik inilah yang bisa ditawarkan objek wisata Telaga Dringo sehingga wisatawan menjadikan lokasi ini sebagai destinasi wisata di Desa Pekasiran dan menjadi rangkaian paket wisata Dieng.

"Telaga Dringo ini berada di ketinggian 2.202 Mdpl merupakan danau tertinggi di Dataran Tinggi Dieng, tempat ini bisa menjadi tempat menikmati alam karena kondisinya yang masih terjaga dan ini menjadi faktor pendukung objek wisata di Desa Pekasiran ini". (Wawancara dengan Anggota Pokdarwis tanggal 26 Mei 2022).

Selain Telaga Dringo, terdapat objek wisata Kawah Candradimuka yang kondisinya pun masih terjaga, tempat ini juga menjadi situs budaya dan menjadi sumber gas dan air minum.

"Kawah Candradimuka merupakan kawah yang berasal dari retakan tanah dan menghasilkan gas belerang yang relatif aman. Di kawah ini juga terdapat kekayaan alam yang sangat alami seperti gas belerang atau solfatara". (Wawancara dengan Anggota Pokdarwis tanggal 26 Mei 2022).

Telaga Dringo dan Kawah Candradimuka merupakan objek wisata favorit wisatawan di Desa Pekasiran. Kedua objek wisata tersebut masih terjaga keasriannya dan ini merupakan faktor pendukung bagi objek wisata di Desa Pekasiran.

b. Terbentuknya Lembaga-Lembaga Kemasyarakatan Desa

Lembaga-lembaga yang terbentuk di desa menjadi wadah partisipasi masyarakat dan sebagai mitra pemerintahan desa. Lembaga ini dibentuk dengan tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan, pemberdayaan masyarakat, pengembangan kemitraan dan pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat. Lembaga-lembaga ini difasilitasi oleh pemerintahan desa melalui musyawarah dan mufakat.

Di Desa Pekasiran terdapat faktor pendukung berupa potensi sumber daya manusia diantaranya adalah sudah terbentuknya Lembaga-lembaga kemasyarakatan desa seperti Karang Taruna, Bumdes, Pokdarwis, Kelompok tani, Kelompok kesenian dan organisasi sosial budaya lainnya. Terbentuknya Lembaga-lembaga kemasyarakatan desa ini tentunya dapat mendukung percepatan pengembangan desa salah satunya di bidang pariwisata.

"Di Desa Pekasiran ini sudah terbentuk Lembaga Kemasyarakatan Desa diantaranya ada kelompok di bidang sosial dan budaya, kelompok di bidang ekonomi, kelompok di

bidang Kesehatan dan kebersihan. Organisasi ini sudah terbentuk hanya saja tentunya masih belum optimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Di bidang pariwisata, kami sudah memiliki Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), kelompok ini menjadi mitra pengelola objek wisata. Beberapa objek wisata di Desa Pekasiran pengelolaannya dikelola oleh 3 pihak, diantaranya, Perhutani, Desa dan Pengelola teknis objek wisata yaitu Pokdarwis".(Wawancara dengan Kepala Desa Pekasiran tanggal 25 Mei 2022).

Dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan pemerintahan desa, Lembaga-lembaga kemasyarakatan desa ini membantu memberdayakan masyarakat, ikut serta merencanakan dan melaksanakan pembangunan serta mengoptimalkan pelayanan masyarakat desa. Dengan sudah terbentuknya Lembaga-lembaga kemasyarakatan desa di Desa Pekasiran ini tentunya menjadi faktor pendukung dalam pengembangan pariwisata, hanya saja tinggal dioptimalkan kemampuan dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing. Hal ini dibutuhkan sebuah pendampingan atau penyuluhan dari pihak-pihak yang ahli dalam pengelolaan dan pengembangan pariwisata.

2. Faktor Penghambat

a. Penghasilan Sebagai Pengelola Objek Wisata Dinilai Kurang Mencukupi

Objek wisata yang dibuka di suatu daerah baiknya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar sehingga keberhasilan dari pengembangan objek wisata adalah mampu meningkatkan pendapatan masyarakat, lapangan pekerjaan bertambah, adanya kesempatan usaha, dapat mengurangi pengangguran sehingga memberantas kemiskinan.

Objek wisata di Desa Pekasiran belum terlalu ramai seperti objek wisata yang berada di daerah Dieng Kabupaten Wonosobo. Objek wisata di Desa Pekasiran belum menjadi destinasi wisata utama dikawasan wisata Dataran Tinggi Dieng. Hal ini mengakibatkan belum banyaknya wisatawan yang datang ke objek wisata di Desa Pekasiran. Dua objek wisata seperti Telaga Dringo dan Kawah Candradimuka mayoritas hanya dikunjungi oleh wisatawan yang berkunjung melalui paket wisata dari *Travel Agent* yang membuka paket perjalanan wisata Dataran Tinggi Dieng.

"Objek wisata disini belum terlalu ramai, tiket masuk Telaga Dringo dan Kawah Candradimuka masing-masing hanya Rp 5.000, dan juga penghasilan tiket masuk tersebut masih harus dibagi kepada beberapa pihak diantaranya 70% kepada Pokdarwis sebagai pengelola objek wisata, 15% kepada Perhutani sebagai pemilik lahan dan 15% kepada pihak desa. Hal ini belum bisa memberikan penghasilan yang cukup kepada masyarakat sekitar sebagai petugas pengelola wisata, sehingga para masyarakat disini lebih memilih berkerja di ladang sebagai petani". (Wawancara dengan petugas penjaga tiket objek wisata, tanggal 26 Mei 2022)

Adanya fenomena tersebut, masyarakat ternyata lebih memilih untuk bekerja sebagai petani dibanding mengelola objek wisata tersebut karena penghasilan yang kurang cukup. Hal ini diperlukan adanya tata kelola pengembangan objek wisata yang dapat memberikan nilai tambah bagi objek wisata tersebut sehingga akan meningkatkan kunjungan wisatawan yang pada akhirnya akan menambah pemasukan objek wisata tersebut.

b. Minimnya Pengetahuan Masyarakat Sekitar Dalam Pengelolaan Objek Wisata

Pengelolaan objek wisata merupakan pengembangan potensi alam yang dimiliki oleh suatu daerah melalui kegiatan pariwisata yang memiliki nilai jual sehingga mampu bersaing dengan daerah lain. Pengelolaan objek wisata yang berbasis masyarakat tentunya harus mempertimbangkan beberapa hal diantaranya aksesibilitas yang nyaman, pelestarian lingkungan, kemajuan ekonomi dan pengelolaan yang berkesinambungan. Berdasarkan peraturan pemerintah No 67 tahun 1996, pengelolaan dan pengusahaan objek dan daya Tarik wisata alam meliputi 4 hal diantaranya:

1. Pembangunan sarana dan prasarana pelengkap serta fasilitas pelayanan lain bagi wisatawan
2. Pengelolaan objek dan daya Tarik wisata alam termasuk sarana dan prasarana yang ada
3. Penyediaan sarana dan fasilitas bagi masyarakat dan sekitarnya untuk berperan serta dalam kegiatan pengusahaan objek dan daya Tarik wisata alam yang bersangkutan
4. Penyelenggaraan pertunjukan seni budaya yang dapat memberi nilai tambah terhadap objek wisata dan daya Tarik wisata alam yang bersangkutan.

Pengelolaan objek wisata ini tentunya membutuhkan sumber daya manusia yang paham akan aspek-aspek pengelolaan objek wisata. Pemahaman akan pengetahuan ini tentunya dapat diperoleh dari berbagai pihak yang memberikan pendampingan dan pengarahan kepada masyarakat sekitar. Sehingga diharapkan masyarakat dapat ikut andil dalam proses pengembangan pengelolaan objek wisata.

“Di Desa Pekasiran sudah terbentuk Lembaga-lembaga kemasyarakatan desa terkhusus untuk bidang pariwisata sudah terbentuk Pokdarwis, akan tetapi masyarakat yang terlibat di dalam Pokdarwis masih minim pengetahuan akan pengelolaan objek wisata sehingga pihak Pokdarwis belum maksimal dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat sekitar objek wisata akan pentingnya pemanfaatan objek wisata” (Wawancara dengan Kepala Desa Pekasiran, tanggal 25 Mei 2022).

c. Alat Penunjang Objek Wisata yang Kurang Optimal

Alat penunjang keberhasilan objek wisata diantaranya adalah ketersediaan sarana dan prasarana. Adanya sarana dan prasarana memudahkan proses pariwisata sehingga berjalan lancar dan tujuan pariwisata dapat tercapai. Suwanto (2004:22) sarana wisata merupakan

kelengkapan daerah tujuan wisata yang diperlukan untuk melayani kebutuhan wisatawan dalam menikmati perjalanan wisatanya. Sarana pokok pariwisata diantaranya adalah *travel agent*, perusahaan angkutan wisata, hotel dan jenis akomodasi lainnya, restoran, rumah makan, objek wisata dan atraksi wisata lainnya.

Prasarana pariwisata adalah sumber daya alam dan sumber daya manusia yang mutlak dibutuhkan oleh wisatawan dalam perjalanannya di daerah tujuan wisata seperti jalan, listrik, air, telekomunikasi, terminal, jembatan dan lain sebagainya (Suwanto, 2004:21).

“Ada beberapa kendala dalam pengembangan objek wisata di Desa ini diantaranya adalah kurang optimalnya sarana dan prasarana yang dapat menunjang daya Tarik objek wisata disini atau bisa dikatakan belum memadai”. (Wawancara dengan anggota Pokdarwis, tanggal 26 Mei 2022).

Dalam pengadaan sarana dan prasarana ini tentunya dibutuhkan dukungan berupa regulasi yang mendukung dari beberapa pihak pemerintah terkait, baik pemerintahan desa, kabupaten, provinsi maupun pusat. Selain itu keaktifan instansi pemerintah serta masyarakat sekitar untuk dapat berperan aktif mencari investor untuk mengembangkan objek wisata di Desa Pekasiran. Tentunya berbagai pihak perlu bahu membahu dalam pengoptimalisasian sarana dan prasarana di objek wisata Desa Pekasiran.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Pengembangan pariwisata berbasis masyarakat merupakan bentuk pengembangan pariwisata yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Partisipasi masyarakat dapat dilakukan dengan dua cara yaitu ikut terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan pembagian manfaat pariwisata. Dari hasil observasi melalui wawancara pengembangan pariwisata berbasis masyarakat di Desa Pekasiran sudah berjalan cukup baik meskipun belum maksimal. Pengembangan pariwisata berbasis masyarakat di Desa Pekasiran dilihat dari keterlibatan pihak-pihak seperti pemerintahan desa, Pokdarwis dan masyarakat lokal.

Pemerintah Desa Pekasiran ikut mengelola objek wisata dan sudah ada dalam hal kebijakan pengembangan pariwisata di Kabupaten Banjarnegara. Peran Pemerintah Desa Pekasiran dalam pengembangan pariwisata berbasis masyarakat diantaranya adalah memfasilitas pembentukan Pokdarwis, distribusi manfaat dari hasil pengelolaan objek wisata dan memfasilitasi kegiatan kerjasama dengan berbagai pihak swasta atau investor.

Kelompok Sadar Pariwisata (Pokdarwis) ikut berperan aktif dalam pengelolaan objek wisata di Desa Pekasiran, diantaranya mendorong dan memotivasi masyarakat untuk mengembangkan objek wisata seperti mengajak masyarakat untuk menjadi pengelola tiket masuk, penjaga kebersihan dan keamanan objek wisata dan pelaksana teknis lainnya. Selain itu Pokdarwis juga melakukan kegiatan pemasaran wisata Desa Pekasiran melalui sosial media.

Masyarakat sekitar Desa Pekasiran ikut terlibat dalam kegiatan pengelolaan wisata seperti melestarikan objek wisata dan ikut terlibat dalam

pengambilan keputusan terkait pengembangan objek wisata. Dengan adanya objek wisata di Desa Pekasiran tentunya membuka lapangan dan kesempatan kerja bagi masyarakat.

Dalam upaya memaksimalkan pengembangan pariwisata berbasis masyarakat, peningkatan keterlibatan pemerintah daerah dan swasta perlu ditingkatkan baik berupa pemberian modal pengembangan aspek fisik objek wisata seperti sarana dan prasarana dan penambahan atraksi wisata maupun upaya pemberdayaan kualitas sumber daya manusia melalui program pendampingan dan pelatihan pengelolaan pariwisata.

PENELITIAN LANJUTAN

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian pada konsep-konsep pengembangan pariwisata lainnya selain pengembangan pariwisata berbasis masyarakat, seperti pengembangan pariwisata berbasis potensi daerah dan pengembangan pariwisata berkelanjutan. Dengan begitu, kita dapat mengetahui bagaimana dan sejauh mana pengelolaan objek-objek wisata di Indonesia sudah melakukan pengembangan pada destinasi wisata daerahnya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih kami sampaikan atas partisipasi dan dukungan pada kegiatan penelitian ini, kepada kepala Desa Pekasiran serta jajaran, pengelola objek wisata Pekasiran yang tergabung di dalam Pokdarwis, dan juga masyarakat lokal Desa Pekasiran. Disamping itu, kami sampaikan terimakasih kepada Lembaga Politeknik Pariwisata NHI Bandung atas dukungan moril dan materil sehingga penelitian ini dapat terlaksana sesuai dengan jadwal.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Isbandi Rukminto. 2008. *Intervoensi Komunitas Pengembangan Masyarakat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Adikampana, I Made. 2017. *Pariwisata Berbasis Masyarakat*. Fakultas Pariwisata, Universitas Udayana: Cakra Press
- Adisasmita, Raharjo. 2011. *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Alfitri. 2011. *Community Development: Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta
- Dwijdowijoto, N Riant dan Wrihatnolo R Randy. 2007. *Manajemen Pemberdayaan*. Jakarta: Elex Media Komputindo
- Firmansyah, Rahim. 2012. *Pedoman Kelompok Sadar Wisata*. Jakarta: Direktur Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- <https://katadata.co.id/doddyrosadi/berita/6058264566a4b/menparekraf-kontribusi-pariwisata-ditargetkan-12-persen-dari-pdb>

- Kusworo, Hendri Adji dan Janianton Damanik. 2002. *Pengembangan SDM Pariwisata Daerah*. Jurnal Ilmu Sosial & Ilmu Politik, Vol. 6, No.1, Juli 2002, p.1-2.
- Mardikanto. 2010. *Konsep Pemberdayaan Masyarakat*. Surakarta: Penerbit TS
- Murphy, P.E. 1985. *Tourism A Community Approach*. Metheun: New York
- Palimbunga, Ika Pujiningrum. 2017. *Bentuk Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Pariwisata di Kampung Wisata Tablanusu Kabupaten Jayapura Provinsi Papua*. Melanesia: Jurnal Ilmiah Kajian Bahasa dan Sastra. Vol 1 No 2
- Pitana, I Gede. 2009. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Rahma, Feni Nadia dan Herniwati. 2013. *Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan, Jumlah Objek Wisata Dan Pendapatan Perkapita Terhadap Penerimaan Sektor Pariwisata di Kabupaten Kudus*. Diponegoro Journal of Economic. Vol 2, No. 2
- Rohim, A. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata (Studi di Desa Wisata Bejiharjo, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunung Kidul, DIY)*. Disertasi: UIN Sunan Kalijaga
- Saarinen, J. 2006. *Traditions of Sustainability in Tourism Studies*. Annals of Tourism Research, 33(4), 1121-1140
- Sastrayuda, Gumelar. 2010. *Konsep Pengembangan Kawasan Ekowisata*. Yogyakarta
- Setyaningsih, Wiwik. 2010. *Community Based Tourism*. Surakarta: Unspres
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Research*. Bandung: Alfabeta
- Suharto, Edi. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: kajian strategis pembangunan kesejahteraan sosial & pekerjaan sosial*. Bandung: Refika Aditama, 2017
- Suwantoro, Gamal. 2004. *Dasar-Dasar Pariwisata*. Yogyakarta: Andi
- Terry, George R. 2009. *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Jakarta: Penerbit Bumi Aksara
- Timothy, Dallen J. dan Boyd, Stephen W. 2003. *Heritage Tourism*. New Jersey: Prentice Hall
- Timothy, D.J. 1999. *Participatory Planning a View of Tourism in Indonesia*, dalam Annuals Review of Tourism Research, XXVI (2).
- Trunajaya, I. G. 2016. *Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat di Kabupaten Badung*. Penelitian Hibah Unggulan Program Studi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Udayana.
- Yoeti, Oka. A. 2008. *Ekonomi Pariwisata: Introduksi, Informasi, dan Implementasi*. Jakarta: Kompas
- Yoeti, Oka. A. 2022. *Perencanaan Strategi Pemasaran Daerah Tujuan Wisata*. Jakarta: PT. Pradaya Pramita